



## Kebijakan Alternatif Untuk Mengatasi Masalah *Bullying* Dan *Cyberbullying* Di Lingkungan Pendidikan

Ahmad Faerul Qodri<sup>1\*</sup>, Radhitya Wies Panca Nugraha<sup>2</sup>, Kartika Nuril Alvi Laily<sup>3</sup>, Hanif Ahsan<sup>4</sup>, Ahsan Maulana Rizqi<sup>5</sup>, Muhammad Irsyad Al Fikri<sup>6</sup>

Bisnis Digital, Telkom University Purwokerto

<sup>1</sup>[Faeruqodri11@gmail.com](mailto:Faeruqodri11@gmail.com), <sup>2</sup>[dederadhitya10@gmail.com](mailto:dederadhitya10@gmail.com), <sup>3</sup>[kartikanuril565@gmail.com](mailto:kartikanuril565@gmail.com), <sup>4</sup>[Ahasanmaulanar@gmail.com](mailto:Ahasanmaulanar@gmail.com),  
<sup>5</sup>[irsyadbeliakun@gmail.com](mailto:irsyadbeliakun@gmail.com), <sup>6</sup>[hanifahsan12@gmail.com](mailto:hanifahsan12@gmail.com)

### Abstrak

*Bullying* di lingkungan pendidikan merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Artikel ini membahas kebijakan alternatif berbasis nilai Pancasila untuk mengatasi *bullying* dan *cyberbullying* secara *holistik*. Kebijakan ini mencakup pendekatan edukasi, pencegahan, dan *intervensi* berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. *Implementasi* nilai-nilai ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan bebas dari *intimidasi*. Analisis ini juga melibatkan peran kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat guna membangun budaya empati dan kesadaran kolektif dalam mencegah *bullying*.

Kata kunci: *Bullying*, *educational bullying*, Pancasila, *Parenting*, *Character Education*.

### PENDAHULUAN

Masalah *bullying* di lingkungan pendidikan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak besar, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitar. Dampak *bullying* tidak hanya bersifat sementara tetapi juga bisa berlanjut hingga dewasa, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan sosial korban serta menciptakan suasana tidak aman bagi semua pihak di lingkungan pendidikan. Meskipun banyak sekolah telah menerapkan kebijakan anti-*bullying*, pendekatan yang ada seringkali kurang efektif karena hanya fokus pada pemberian hukuman dan kurang memperhatikan pencegahan serta pemulihan. Oleh karena itu, judul ini diambil untuk mengeksplorasi kebijakan alternatif yang lebih komprehensif dan inovatif dalam menangani *bullying* di lingkungan sekolah.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk merumuskan kebijakan alternatif yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengintegrasikan edukasi, pencegahan, dan *intervensi* berkelanjutan dalam penanganan *bullying*. Kebijakan ini diharapkan mampu membangun budaya empati, kolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman di sekolah. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih inklusif, melibatkan berbagai pihak seperti siswa, guru, orang tua, dan masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari *bullying*.

Dengan seiring semakin beragamnya bentuk *bullying*, termasuk *cyberbullying* yang dapat terjadi kapan saja melalui media sosial, kebijakan alternatif yang inovatif dan komprehensif sangat mendesak untuk segera diterapkan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, serta memastikan *intervensi* efektif bagi korban dan pelaku *bullying*, adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tanpa kebijakan yang efektif dan menyeluruh, *bullying* akan terus menjadi ancaman serius bagi perkembangan karakter dan kesejahteraan mental generasi muda.

### CARA PENGAMBILAN DATA

Wawancara dibagi dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Pada wawancara terstruktur, instrumen wawancara disediakan untuk digunakan dalam melakukan wawancara. Dilaksanakan secara runtun dari awal sampai pertanyaan selesai. Tujuan dari wawancara ini untuk menggali informasi yang sudah direncanakan sebelumnya dalam menjawab masalah utama. Wawancara bebas dilakukan disesi khusus dan hanya dilakukan sesuai kebutuhan data informasi yang akan dicari. Hal ini untuk mendukung data utama. Olehnya wawancara dilakukan secara bebas menyesuaikan kebutuhan data yang kurang. Telaah Dokumen dilakukan untuk

memastikan informasi yang diberikan oleh informan benar adanya. Tujuannya untuk menguatkan asumsi dengan bukti data yang akurat. Sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

### ANALISA

Bullying merupakan masalah serius yang mengancam bagi semua kalangan dari berbagai jenjang umur, baik itu di sekolah hingga di tempat kerja. Walaupun demikian, perilaku bullying masih kurang mendapat perhatian oleh khalayak umum, sehingga risiko terjadinya bullying menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena secara umum, efek yang ditimbulkan dari bullying tidak terlihat secara langsung, ini terjadi karena korban memiliki kecenderungan untuk bungkam dan tidak melaporkan apa yang dialaminya. Lalu banyak kasus bullying yang hanya dianggap sebagai candaan dan sesuatu yang tidak terlalu penting. Selain itu, teknologi digital seperti media sosial, forum online, atau platform lainnya juga menjadi penyebab terjadinya perundungan yaitu, cyberbullying.

Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa dampak cyberbullying sangat serius, termasuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan dalam kasus ekstrem, dorongan untuk bunuh diri. Upaya untuk mengatasi cyberbullying memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan yang ketat, serta dukungan bagi korban untuk pulih dari trauma psikologis. Integrasi teknologi keamanan yang lebih baik di platform digital juga menjadi kunci untuk mencegah dan menanggulangi tindakan cyberbullying secara efektif. (Fikri, A.M. 2023)

Beberapa faktor pemicu utama dari cyberbullying termasuk anonimitas di dunia maya, kemudahan akses teknologi, dan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan institusi pendidikan. Anonimitas di internet seringkali memberikan rasa aman palsu kepada pelaku, mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak akan mereka lakukan di kehidupan nyata. Kemudahan akses teknologi, seperti smartphone dan media sosial, memungkinkan tindakan bullying dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan dampaknya. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah juga menjadi celah yang mempermudah pelaku untuk terus melakukan cyberbullying tanpa hambatan. Ada pun kebijakan pencegahan dan penanganan cyberbullying:

1. Pendidikan dan Kesadaran Digital: Program pelatihan untuk siswa dan guru mengenai etika digital dan bahaya cyberbullying sangat diperlukan. Mengintegrasikan topik ini dalam kurikulum sekolah akan membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan siswa, sehingga mereka lebih mampu mengenali dan menangani cyberbullying (Fitria & Efendi, 2022).
2. Peran Orang Tua: Orang tua memainkan peran penting dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Mereka harus dilibatkan dalam program edukasi yang memberikan pemahaman tentang tanda-tanda cyberbullying dan dampaknya (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).
3. Penanganan di Sekolah: Sekolah perlu memiliki prosedur pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh siswa. Setiap insiden harus ditangani dengan adil dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Penyebab terjadinya bullying adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku intimidasi dan targetnya (korban). Ketidakseimbangan kekuatan ini dapat bermanifestasi sebagai ukuran tubuh, kekuatan fisik, rasio pelaku terhadap korban, kemampuan bahasa, jenis kelamin, status sosial, dan sentimen superioritas. Pelaku kemudian memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan ini dengan menginterupsi, terus menerus menyerang, atau mengucilkan orang lain. Kepentingan yang diinginkan mungkin berbentuk kompleks superioritas, kepentingan ekonomi, atau sekadar kegembiraan melihat orang lain menyerah kepada mereka.

Bullying terjadi karena adanya perbedaan, dalam artian luas menyangkut perbedaan ras, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Pemahaman yang menyimpang dan sikap negatif atas heterogenitas dapat dikurangi hingga dihilangkan dengan mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan pada sistem pendidikan nasional; kebijakan pihak berwenang dalam bidang pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan terstruktur yang dibantu dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan elemen sekolah/ perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi masalah perundungan pada lingkungan pendidikan dapat dilaksanakan melalui nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pedoman dan falsafah hidup yang dapat digunakan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sanskerta "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti asas. Selain itu, kata sila berasal dari kata susila yang berarti sikap baik. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai lima landasan atau dapat juga diartikan sebagai lima sikap dan perilaku yang baik. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dalam menangani masalah bullying. Pancasila menekankan prinsip-prinsip dasar yang berfokus pada persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan toleransi antar sesama.

Konsep pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) yakni: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".

Oleh karena itu, perilaku bullying di lingkungan pendidikan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan cara menanamkan pada anak nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Melalui prinsip yang pertama inilah kita para guru dapat menjelaskan kepada murid-murid kita bahwa Peran kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah saling menghormati. Kita tidak boleh bersikap kasar terhadap sesama warga negara agar tidak merugikan siapa pun. Siswa juga harus diajarkan ilmu saling mencintai yang diajarkan agama. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir perilaku bullying.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua ini memuat nilai-nilai yang melestarikan kemanusiaan. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang berkeadilan dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, diciptakan berdasarkan semangat saling menghargai, toleran dalam bertindak sehari-hari, dan merupakan : merujuk pada pribadi yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi. Manfaat kebersamaan. Dalam hal ini kita sebagai pendidik dapat mendidik anak didik kita untuk berperilaku baik terhadap sesamanya. Kita manusia harus bertindak adil dan tidak memperlakukan orang lain secara berbeda. Dalam Sila Kedua Pancasila mengharuskan masyarakat Indonesia untuk “memanusiakan manusia.” Artinya, seluruh warga negara Indonesia harus mampu memperlakukan orang lain sebagai manusia, dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling bermusuhan, dan berbuat baik kepada orang lain. Bullying bisa dikatakan kebalikan dari prinsip kedua, jadi jika memahami dan mempraktikkan prinsip kedua, maka bullying akan berhenti dengan sendirinya.

3. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga erat kaitannya dengan perbuatan yang mungkin berkaitan dengan persahabatan. Jika siswa memahami arti persatuan tersebut, pasti mereka akan saling menghormati dan bersahabat dengan semua orang. Membina persahabatan antar siswa dapat mengurangi atau mencegah perilaku bullying. Mereka bersatu dan menciptakan suasana hangat dan menyenangkan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip keempat mengajarkan kita untuk hidup dengan musyawarah. Konsultasi yang berlangsung dapat membentuk sikap demokratis. Siswa diharapkan bersikap demokratis dan mampu menghargai perbedaan pendapat dengan teman sebayanya. Jika mahasiswa memahami makna demokrasi, maka perundungan karena perbedaan pendapat dengan sendirinya akan berhenti terjadi dikalangan mereka. Hal ini memungkinkan siswa untuk hidup rukun dan saling menghargai perbedaan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kelima ini mencakup nilai keadilan. Di sini, anak dapat diajarkan untuk bersikap adil kepada semua orang, termasuk tidak membedakan teman, berteman dengan semua orang, dan tidak memperlakukan setiap teman secara berbeda. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila bermanfaat dan tentunya bermanfaat dalam mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik.

Selain itu Peran Pancasila khususnya prinsip kemanusiaan sangat penting dalam mengatasi Bullying atau perundungan. Prinsip kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat semua individu, termasuk korban perundungan berikut diantaranya yakni;

1. Penghormatan terhadap hak dan martabat: Prinsip Kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu. Dalam konteks penindasan, hal ini berarti bahwa korban penindasan harus dihormati dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pendidikan Pancasila : Pendidikan Pancasila dapat digunakan sebagai fungsi pendidikan untuk meningkatkan moral siswa dan mencegah munculnya perilaku negatif seperti perundungan. Guru dapat memberikan pengetahuan tentang makna dan dampak bullying serta memasukkan materi hak asasi manusia dan Pancasila lainnya ke dalam pelajaran mereka.

3. Pemantauan dan Pengendalian: Guru dan sekolah harus berperan aktif dalam memantau dan mengendalikan perilaku bullying. Anda dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa, memberikan nasihat kepada siswa yang melakukan tindakan bullying, dan memberikan perhatian kepada siswa yang melakukan tindakan bullying. Perawatan ini dapat diberikan dengan pendekatan bimbingan dan konsultasi.

4. Sosialisasi dan Kesadaran: Mendorong sosialisasi melalui program anti-bullying agar seluruh pemangku kepentingan di sekolah, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf sekolah hingga orang tua, mendapat informasi tentang bullying dan dampaknya.

Jika pendidikan kewarganegaraan diimplementasikan ke dalam kebijakan dan standar nasional pendidikan maka dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan bangsa (universal) ialah sebagai berikut:

- a. Mengurangi angka kasus bullying di Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas mental dan kualitas belajar peserta didik.
- c. Semakin banyaknya pelajar, orang tua dan masyarakat sadar akan bentuk-bentuk, bahaya dan cara menyikapi tindakan bullying.
- d. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam pribadi peserta didik.
- e. Mengurangi stigma negatif terhadap kelompok etnik, ras, budaya dan agama tertentu
- f. Menyadarkan peserta didik tentang pentingnya menjaga dan menghargai kemajemukan yang ada di Indonesia.
- g. Membentuk peserta didik yang bermoral, beretika, dan berjiwa kebangsaan.

Dari nilai-nilai Pancasila terlihat bahwa Pancasila mempunyai banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membentuk karakter baik peserta didik. Nilai-nilai Pancasila dinilai mempunyai peranan penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk karakter positif generasi muda, karena pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat

membentuk kepribadian bangsa khususnya generasi muda, generasi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan (Fitriani dan Dewi, 2021), kehadiran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi benteng pembaharuan karakter bangsa yang telah hilang di hadapan masyarakat karena pengaruh dampak globalisasi.

### KESIMPULAN

Bullying merupakan perilaku agresif yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, perundungan juga dapat berdampak pada lingkungan belajar dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan yang tidak aman dan ketidakadilan yang diungkapkan melalui penindasan dapat merusak moral dan etika sosial. Implementasi kebijakan anti-bullying yang holistik sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah adalah kunci dalam mencegah dan menangani kasus bullying dan cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwa penindasan tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga berdampak pada seluruh komunitas, termasuk pendidik dan orang tua yang mungkin merasa tidak aman atau tidak mampu melindungi anggotanya. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan tindakan untuk mencegah dan memerangi. Hal ini mencakup pendidikan dan kesadaran, penegakan hukum yang lebih kuat, dan dukungan bagi korban. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

### DAFTAR PUSTAKA

- Purba., H. (2024). *Bullying dalam perspektif sila kedua pancasila*. Jurnal istiqomah, 1(4), 110-116. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/1416/1179>
- Padli, F., Ummah., S. R., Rusdi., & Mannan, A. (2023). *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Bullying*. Jurnal Sinestesia, 13(1), 2721-9283. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/download/349/160/809>
- Fikri., A.M. (2023). *Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal unes law review, 2622-7045. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2119/1690/>
- Daffa, Muhammad Rozaan Setya, dkk. (2023). *Peranan Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Terhadap Psikologis Remaja Pada Kasus Bullying*. Seminar Nasional & Call For Paper HUBISINTEK. 644-653.
- Fitria, Y., & Efendi, A. (2022). *Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying dan Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh*. JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 15–23.
- Pratiwi, Eka Fauziah, dkk. (2021). *Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying*. Jurnal Basicedu. 5(6), 5472-5480.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Saku Stop Bullying*.